

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Ahmad, Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Amrusi, Fahmi dan Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung, Nusamedia, 2012.

Aminuddin, Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenada media Group, 2018.

Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Citra, 2005.

Djaenuri, Aries. *Modul Mata Kuliah Pemerintahan Daerah Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Universitas Terbuka, 2012.

Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.

Haris, Syamsudin. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPPI Press, 2007.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2011.

Isharyanto. *Ilmu negara*, Karanganyar, Oase Pustaka, 2016. Isjwara, Freed. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Binacipta, 1974.

Istanto, Sugeng. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Yogyakarta, Karya Putra, 1971.

Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1984.

Kusnardi, Moh, dan Ibrahim, Harmaily. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Pusat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983.

Ni'Matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media, 2012.

Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*,

Yogyakarta, Zanafa Publishing, 2018.

Sakti Suryo, *Gubernur*, Jakarta, Graha Ilmu, 2011.

Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 2016.

Soehino. *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1988.

Strong, C. F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Syarifudin, Ateng. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung, Bina Cipta, 1985.

Syarifudin Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan & Jabatan*, Jakarta, Sinar Garfika, 2017.

Tjandra, Riawan, W. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2008.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 251).

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6).

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 tentang tugas, pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Kesehatan.

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

3. Jurnal

Andi Islamuddin, Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 2, No.11, 2021.

Andi Pitono, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Kebijakan Publik* , Vol.3,No 1, 2012.

Dian Agung Wicakso, Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.3, 2015.

Ika Ariania Indriyani, Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan, *Journal of Social Politics and Governance* , Vol.1 No.1, 2019.

Meima, Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No.4, 2021.

4. Disertasi

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1990.

5. Media Online

Rendra Topan, 09 Januari 2018, “Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren dan Kewenangannya, [Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota Hukum Positif Indonesia \(rendratopan.com\)](#)”, Diakses pada tanggal 01 November Tahun 2022.

Ruang Pengetahuan, 04 Desember 2017,“Pengertian dekonsentrasi”, <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-dekonsentrasi/>, Diakses pada tanggal 09 September Tahun 2022.

JagadID, 08 Maret 2023, Pengertian Kabupaten, <https://jagad.id/definisi-kabupaten/>, Diakses pada tanggal 08 April 2023.

Dinas Kesehatan Pangandaran, 12 Desember 2022, Dinas Kesehatan Pangandaran ,dinkes.pangandarankab.go.id/public/, Diakses pada tanggal 01 Februari, Tahun 2024.